

SKRIPSI
AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN
LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Oleh :
NUR AINI
NPM. 1903030015



Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2023 M

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN
LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NUR AINI
NPM.1903030015

Pembimbing : Era Yudistira, M,Ak

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN
LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, November 2023
Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU

Nama : NUR AINI

NPM : 1903030015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2023
Pembimbing,



Era Yudistira, M,Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-3710/In-28.3/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan judul : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR, Disusun oleh: NUR AINI, NPM. 1903030015, Jurusan Akuntansi Syariah (AKS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Selasa/ 28 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Era Yudistira, M.Ak

Penguji I : Esty Apridasari, M.Si

Penguji II : Thoyibatun Nisa, M.Akt

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Oleh:

**NUR AINI
NPM. 1903030015**

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program pemberian bantuan sosial masyarakat. Mekanisme PKH dilakukan mulai dari perencanaan, penetapan calon, pertemuan awal, sosialisasi, validasi, verifikasi, penyaluran dana PKH, pemutahiran data. Dalam pencapaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus dipertanggungjawabkan oleh koordinator pelaksanaan kegiatan. Untuk menghindari masalah dan mencegah kecurangan, mekanisme akuntabilitas harus memiliki dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas hukum dimana akuntabilitas terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan datamenggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam pengambilan sampel wawancara menggunakan teknik *Snowball sampling*. Dimana data yang digunakan yaitu 12 penerima PKH, 2 pendamping, 1 orang pejabat Desa.

Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu Pelaksaaan PKH ini dilihat dari 6 indikator tersebut sudah akuntabel karena dalam pelaksanaan tersebut pendamping atau aparatur desa mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam penyaluran pun jarang terjadi masalah. Setelah semua data sinkron dengan dapodik,simpatik, dukcapil DTKS banyak yang mengalami masalah dari NIK tidak padan dukcapil, NIK ganda, dan lainnya namun pendamping merespon dengan baik keluhan KPM dan mencari solusinya.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR AINI

NPM : 1903030015

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2023
Yang Menyatakan,



NUR AINI
NPM. 1903030015

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl:90)*

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang kucintai yaitu Bapak Slamet dan Ibu Harini yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Trimakasih banyak atas pengorbanan dan juga pengalaman yang sudah diberikan, terimakasih sudah senantiasa mendukung baik secara moral maupun materi, serta doa yang senantiasa dipanjatkan, semoga allah selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan.
2. Kakak dan Nenek yang aku sayangi terimakasih atas doa dan dukungan yang slalu diberikan dari dahulu sampai sekarang.
3. Bapak Junaidi selaku Kepala desa dan staf yang bertugas di kantor desa terimakasih atas doa serta bantuan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dodi Irawan dan Ibu jumaroh, serta seluruh pendamping dan juga staf dinas sosial atas doa serta bantuan yang telah diberikan.
5. Temen-temen seperjuangan, teman kosan, serta keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2019, terimakasih sudah membeantu dan memberi semangat.
6. Almamater tercinta serta keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Metro.
7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang judul “*Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur*” dalam memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sastra Satu (S1).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA., selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Norta Idaman M.M Selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik Dan Skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penulisan proposal ini.
5. Bapak Dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Skripsi ini.

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Metro Desember 2023
Penulis,



NUR AINI
NPM. 1903030015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB LANDASAN TEORI	
A. Akuntabilitas	13
1. Pengertian Akuntabilitas	13
2. Indikator Akuntabilitas.....	14
B. Konsepsi Program Keluarga Harapan.....	16
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	16
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	17
3. Kriteria Penerima Manfaat	17
4. Landasan Program Keluarga Harapan	19

5. Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	19
6. Besar Banutan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu	32
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Penerima Pkh Tahap 1 Tahun 2023	7
Tabel 2. 1 Besaran Bantuan PKH	20
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Rajabasa Lama	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Prasurvey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi dimana kebutuhan hidup yang layak untuk masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan juga perlindungan sosial. Yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program.¹ Melalui Dinas Sosial Pemerintah menjalankan berbagai stimulasi dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya program yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan (PKH) ini dilakukan dengan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).²

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Beberapa yang harus diperhatikan yaitu Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dan indeks

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*, t.t.

² Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2021). 7

keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu penyesuaian bahan bakar minyak, dan naiknya bahan pokok yang sering dibutuhkan, dan tidak adanya lowongan pekerjaan sehingga mengakibatkan pengangguran.³

Program keluarga harapan (PKH) diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2007, PKH juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong untung kemandirian bagi penerima manfaat, yang disebut sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM). Sejak tahun 2007 pemerintah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan agar menciptakan masyarakat yang sejahtera, oleh sebab itu penggunaan dana PKH harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten dan 6,709 kecamatan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan oleh pendamping-pendamping PKH yang memiliki tugas memfasilitasi peserta penerima bantuan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk dengan pertemuan terhadap peserta penerima bantuan untuk memantau dan mendata kembali peserta dan memastikan peserta PKH telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

Berdasarkan UU No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data

³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia*, 2022. 7

terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).⁴ Program keluarga harapan (PKH) yaitu salah satu program pemerintah yang bertujuan guna memberdayakan masyarakat melalui program perlindungan sosial dengan melaksanakan pemberian uang non tunai kepada Keluarga penerima manfaat (KPM).⁵

Pada Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kriteria penerima manfaat PKH dapat dibedakan menjadi komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesehatan sendiri memiliki kriteria yaitu ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini dengan rentang usia 0 – 6 tahun. Untuk komponen pendidikan sendiri terdapat kriteria anak usia sekolah dengan usia 6 – 21 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dan menempuh pendidikan tingkat SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, dan SMA/MA sederajat. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial memiliki kriteria penerima PKH yaitu lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Tugas utama pendamping PKH yaitu melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH, yakni pertemuan pertama, kemudian validasi Keluarga penerima manfaat, pembaharuan data, verifikasi komitmen pelayanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan pertemuan rutin guna peningkatan kemampuan keluarga, melakukan

⁴ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan” (t.t.).

⁵ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2021), 22-23

penanganan pengaduan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan.⁶

Dalam penyaluran dana PKH ini Masyarakat yang menerima PKH, melewati beberapa alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu perencanaan yang dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Tahap selanjutnya yaitu persiapan pertemuan awal dan validasi kegiatan pada pertemuan awal dilakukan untuk melakukan validasi data dan mencocokkan data awal dengan fakta dilapangan. Data calon penerima KPM PKH dikirim ke pendamping untuk dilakukan validasi melalui aplikasi e-PKH, kemudian pendamping melakukan persiapan pertemuan awal dan melakukan pertemuan awal. Pelaksanaan validasi pada calon penerima PKH yang hadir pada pertemuan awal dan menandatangani formulir validasi, kemudian memberikan informasi tentang kelengkapan data untuk membuka rekening bank. Tahap selanjutnya yaitu penetapan KPM PKH, penyaluran Bantuan sosial dan pemutakhiran data yaitu agar dapat memperoleh kondisi terkini, verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, selanjutnya yaitu pendampingan Dan transformasi kepesertaan.⁷

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur mempunyai peran penting dalam memaksimalkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan hingga bertanggung jawab atas

⁶ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2021). 22-24

⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. 26-35

kinerja yang diukur seobjektif mungkin. Kepala desa sendiri memiliki peran terhadap program keluarga harapan (PKH) sebagai tahap awal penginputan data menggunakan KTP dan KK. Kemudian melakukan musyawarah untuk mengetahui warga yang layak masuk kedalam DTKS. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) oleh operator desa/kecamatan. Kepala desa memiliki tanggung jawab data yang sudah diinput di SIKS harus sesuai dengan kondisi dilapangan dan sesuai dengan kriteria.

Dalam pencapaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus dipertanggungjawabkan oleh koordinator pelaksanaan kegiatan. Untuk menghindari masalah dan mencegah kecurangan, mekanisme akuntabilitas harus memiliki dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas hukum dimana akuntabilitas terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.⁸ Seperti yang disampaikan oleh bapak Zunaidi selaku kepala Desa pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan aturan namun beberapa masyarakat yang mengeluh pada kepala desa mengenai ketidak pernahan masyarakat mendapatkan bantuan apapun, hingga masyarakat mendatangi kantor kepala desa agar nik/nomor kartu keluarganya didaftarkan. Namun ada masyarakat yang meminta surat keterangan tidak mampu dan tidak mendapatkan persetujuan atau tanda tangan dari bapak kepala desa dikarenakan masyarakat

⁸ Syarifah Alawiyyah, Unti Ludigdo, dan Aji Dedi M, "Akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada UPK-G," *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* Vol. 6 No 2 (2017). 131-132

tersebut dalam kondisi mampu, namun masyarakat tersebut tetap ingin mendapatkan persetujuan tersebut.⁹

Di Desa Rajabasa Lama ini pemerintah memiliki beberapa program dalam mengurangi kemiskinan seperti BLTDD (Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa) yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yang berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang, PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial. Menurut Penuturan dari Bapak Junaidi selaku kepala desa di desa Rajabasa Lama, beliau mengatakan untuk penerima bantuan penerima bantuan PKH berjumlah 514 orang. Untuk bantuan BPNT sendiri berjumlah 826 orang. Penerima manfaat dari program BLTDD ini dipilih langsung harus memiliki syarat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari kementerian sosial. Bantuan PKH sendiri keluar setiap 3 bulan sekali.¹⁰

Program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan di desa rajabasa lama kecamatan labuhan ratu dibantu langsung oleh pendamping-pendamping PKH. Pendamping PKH sendiri dikecamatan labuhan ratu terdiri dari 9 pendamping dengan masing-masing pendamping mendampingi 200-300 kpm. Didesa rajabasa lama sendiri terdapat 4 pendamping. Berikut ini tabel daftar penerima bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2023 didesa Rajabasa Lama.¹¹

⁹ Zunaidei, Wawancara dengan Kepala Desa, Oktober 2023.

¹⁰ Bapak Junaidi, Kepala Desa Rajabasa Lama, 12 Maret 2023.

¹¹ Irawan Dodi dan Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH, 28 Maret 2023.

Tabel 1. 1
Daftar Penerima PKH Tahap 1 Tahun 2023

No	Nama Dusun	Jumlah
1	MEGASAKTI	54
2	MEGAKENCANA	34
3	SETIA BATIN	48
4	SUBING JAYA	94
5	SUBING PUTRA	5
6	SUBING PUTRA II	60
7	SUBING PUTRA III	32
8	SUBING PUSPA TIMUR	50
9	SUBING PUSPA BARAT	47
10	SINAR DEWA TIMUR	33
11	SINAR DEWA BARAT	33

Sumber : Ketua Koordinasi Program Keluarga Harapan

Dari data diatas desa yang paling banyak menerima PKH yaitu terdapat pada dusun Subing jaya. Dikarenakan didusun subing jaya banyak masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah sehingga banyak KPM yang berasal dari dusun tersebut. Menurut laporan dari KPM maupun masyarakat tahun-tahun sebelumnya terdapat KPM yang komponen didalamnya sudah tidak ada namun masih menerima PKH dan terdapat juga lansia yang tidak menerima bantuan PKH tersebut.¹²

Penggunaan dana PKH masih berkecukupan untuk pemenuhan kebutuhan saja belum untuk kemandirian para KPM. Hasil survei yang peneliti lakukan kepada penerima dana PKH, yaitu kepada Ibu Tri/bapak agus jumadi menjadi anggota PKH dari tahun 2017, dengan komponen balita dan SMA dengan nominal Rp. 1.250.000 / 3 bulan sekali. Uang yang saya dapat dari PKH saya gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak saya, seperti membeli seragam, peralatan sekolah dan uang transportasi ke sekolah dan kadang juga

¹² Ersi, Wawancara dengan penerima PKH, 20 September 2023.

saya gunakan untuk keperluan lainya untuk pemenuhan kebutuhan lainya seperti membeli pulsa token listrik.¹³ Penerima dana PKH selanjutnya yaitu Ibu JumiSri beliau sudah ikut serta sejak tahun 2017,terhitung sudah 5 tahun jadi anggota PKH dengan komponen SMP dengan nominal Rp.375.000/ 3 bulan sekali.¹⁴

Penyaluran PKH diDesa Rajabasa Lama ini memiliki beberapa masalah yang sering dihadapi baik ibu berupa NIK ganda NIK tidak padan, komponen yang didalamnya sudah tidak ada atau meninggal masih menerima, dan juga lansia yang tidak mendapat bantuan. Oleh karena itu terdapat masyarakat yang mengeluh atau protes kenapa tidak mendapat bantuan dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : “Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yaitu bagaimana akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur?

¹³ Ibu Tri, Wawancara dengan Penerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH), 27 Februari 2023.

¹⁴ Ibu Jumistri, Wawancara dengan Penerima Dana Bantuan Program Keluarga Harapan, 27 Februari 2023.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh hasil yang dapat bermanfaat antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rajabasa Lama.

b. Secara Praktis

Secara praktis yaitu sebagai bahan kajian dan pemikiran untuk semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Rajabasa Lama guna meningkatkan kinerja serta pelayanannya. Selain itu memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sesuai dengan aturaan

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian terdahulu bersumber dari karya orang lain berkaitan dengan tema ataupun topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.¹⁵ Terdapat beberapa hasil penelitian yang berkesinambungan dengan pokok masalah yang peneliti akan kaji dalam penelitian ini.

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Endang Tri Pratiwi, Dewi Mahmuda, Ernawati Malik, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton	Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau).	Tujuan untuk mengetahui interpretasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindak lanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Baubau	Hasil dari penelitian tersebut yaitu Salah satu upaya pemaksimalan kinerja tersebut adalah dengan mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/ Lembaga/ Badan Pemerintah, disingkat LAKIP. Dan masih terdapat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang belum memahami konsep pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pelaporan kinerja dan capaian kinerja yakni keterbatasan sumber daya manusia khususnya APIP baik dari segi	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabelnya. Terletak pada tempat yang akan diteliti, tahun teliti serta partisipannya. Pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

¹⁵ "Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro," 2018. 30

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kuantitas maupun kualitas serta perlunya peningkatan sistem pengendalian intern pada level yang lebih baik sebagai jaminan sistem pengendalian intern yang dapat menekan angka penyimpangan.		
2.	Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila program studi Akuntansi di Universitas Jember	Akuntabilitas penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)	Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial PKH di Desa Kabuaran	basis operasional pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH di Desa Kabuaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, dan Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/BS.02.01/01/2020. Akuntabilitas internal dan eksternal PKH Desa Kabuaran telah dilaksanakan dengan baik dalam bentuk laporan kegiatan, laporan pemutakhiran data, laporan penyaluran bantuan PKH, serta bilik pengaduan PKH dan penyaluran bantuan PKH dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan	membahas tentang Akuntabilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan menggunakan metode deskriptif Kualitatif	Perbedaannya terletak pada tahun penelitian, tempat dilakukannya penelitian dan variabel yang digunakan.

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				bebas dari pungutan liar dan penyelewengan dana bantuan		
3.	Arlina, Muhammad Guntur, Umar Nain program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar	implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga didesa Lilirawang kecamatan Bengo kabupaten Bone (studi kasus: PKH Bidang Pendidikan)	Untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone khususnya pada bidang pendidikan kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan dari keempat indikator keberhasilan implementasi kebijakan oleh Cheema dan Rondinelli hanya satu indikator yang berjalan dengan baik. Selain itu, faktor pendukung salah satunya adalah bantuan yang diberikan tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan PKH	Persamaan dari penelitian ini yaitu pada variabel program keluarga harapan (PKH)	perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian tahun penelitian variabel penelitian, dan hasil penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berdasarkan terminologi berasal dari bahasa Latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban.¹

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban organisasi terhadap laporan akuntabilitas kinerjanya baik, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut baik, namun jika laporan kinerja organisasi tersebut buruk dalam artian gagal maka kinerja organisasi tersebut dapat dikatakan gagal.²

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya mampu untuk bertanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, serta bersikap jujur. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan program dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut secara penuh kepada masyarakat. Konsep ini didasarkan atas asas kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang diberikan wewenang,

¹ Selmita Paranoan dkk., *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2022).1-2

² Paranoan Dkk.9

dimana manajemen dalam suatu organisasi dianggap dapat menyelesaikan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawab.³

2. Indikator Akuntabilitas

Semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan serta penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. David Hulme dan Mark Turner (1987), mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, adapun indikator akuntabilitas antara lain yaitu :⁴

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah, maka legitimasi menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi.

b. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Kualitas moral dari seorang pegawai organisasi pemerintahan sangatlah penting baik dalam konteks penyediaan pelayanan publik dan kegiatan lain yang masih dalam konteks kepentingan organisasi.

³ Alfasadun, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Prosiding SENDI, 2018). 685

⁴ Raba menggaungkan, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMMPress, 2020). 101

Dengan demikian pegawai tidak hanya bersikap ramah namun juga tidak melakukan diskrimasi dalam proses pelayanan. Selain itu, pegawai harus dituntut bekerja berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan agar tidak terjadi penyelewengan dalam organisasi.

c. Kepekaan

Kepekaan para pegawai atau aparatur pemerintah berupa upaya atau tindakan pemerintah untuk menyaring atau mengakomodir aspirasi masyarakat. Karena dalam konsep akuntabilitas juga sangat ditekankan adanya partisipasi masyarakat. Aspek kepekaan menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kebagiaan pemerintah kedepannya.

d. Keterbukaan

Aspek selanjutnya dalam indikator akuntabilitas yakni aspek keterbukaan atau dikenal juga dengan istilah transparansi. Keterbukaan aparatur atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparat dalam melakukan pelayan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan dapat diwujudkan dengan

adanya pelayanan informasi publik dan adanya laporan tahunan kegiatan organisasi pemerintahan.

e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal

Pemnfataan sumber daya yaitu mendaya gunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat

f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. Aspek efisiensi dan efektivitas dapat dilaksanakan dengan merancang kegiatan atau program yang obyektif dan sesuai dengan panduan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa aspek efisiensi dan efektivitas berusaha untuk mencapai hasil yang objektif dalam tiap kinerja pemerintah. Karena kinerja pemerintah harus didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan panduan yang berlaku, sehingga dapat berjalan dengan optimal.

B. Konsepsi Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial masyarakat. Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH,

penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, validasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan transformasi kepesertaan PKH.⁵

Program Keluarga Harapan yaitu program bantuan tunai bagi rumah tangga miskin (RTM) yang dimana para peserta PKH diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Program ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang, dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban bagi yang menerimanya, sedangkan dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat menuntaskan mata rantai kemiskinan.⁶

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan utama pada adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, merubah prilaku dan kemandirian KPM dan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁷

3. Kriteria Penerima Manfaat

Sasaran yang berhak mendapatkan PKH yaitu keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sesuai kriteria. Direktorat jaminan sosial keluarga menetapkan data

⁵ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2021). 22

⁶ KOMINFO RI, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* (Jakarta, 2011). 18

⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. 22

KPM PKH yang ada sehingga hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui surat keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.⁸

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut :⁹

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH dengan komponen Kesehatan yaitu ibu hamil/nifas/menyusui, dan anak usia dini

b. Komponen pendidikan

Kriteria penerima PKH pada komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah dengan rentan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat, SMP/Mts sederajat, dan SMA/MA sederajat.

c. Komponen kesejahteraan sosial

Pada komponen kesejahteraan sosial memiliki kriteria yaitu lanjut usia yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Penyandang disabilitas berat yang sudah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

⁸ Kementerian Sosial RI.hal.28-29

⁹ Kementerian Sosial RI.hal.23

4. Landasan Program Keluarga Harapan

Dasar hukum Program Keluarga Harapan tertuang dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018:¹⁰

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- c. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
- d. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian Negara

5. Alur Pelaksanaan PKH

Pada pelaksanaan PKH terdapat langkah atau tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dimana pihak pelaksana harus memenuhi apa yang sudah menjadi ketetapannya. Berikut alur pelaksanaan PKH yaitu: ¹¹

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

¹⁰ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.”

¹¹ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.hal.26-35

- f. Pendampingan PKH
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga
- h. Ferivikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH
- j. Transformasi Kepesertaan PKH (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 32)

6. Besar Bantuan Dana PKH

Dalam bantuan PKH yang diberikan kepada rumah tangga miskin dalam setiap komponen memiliki besaran bantuan yang berbeda-beda antara lain yaitu:

Tabel 2. 1
Besaran Bantuan PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1	Ibu Hamil/Menyusui	Rp 3.000.000
2	Anak Usia dibawah 6 tahun	Rp 3.000.000
3	Peserta Pendidikan SD/ sederajat	Rp 900.000
4	Peserta Pendidikan SMP/ sederajat	Rp 1.500.000
5	Peserta Pendidikan SMA/ sederajat	Rp 2.000.000
6	Penyandang Disabilitas berat	Rp 3.000.000
7	Lanjut usia	Rp 2.400.000

Sumber : *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Dalam 1 keluarga RTM (rumah tangga miskin) maksimal hanya mendapatkan 4 komponen penerima bantuan PKH. Pembayaran atau pencairannya dilakukan 4 kali dalam 1 tahun yaitu tahap pertama pada bulan januari, tahap kedua april, tahap ketiga juli dan tahap

keempat oktober, yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana bantuan dibayarkan langsung pada peserta PKH dengan pendamping PKH pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).¹²

¹² Kementerian Sosial RI.hal.32

BAB III

MEOTDE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai judul dan fokus permasalahan penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi dimasyarakat tentang akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).

B. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini harus jelas dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian.¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer terdiri dari 12 peserta penerima PKH 2 orang pendamping 1 orang masyarakat dan 1 orang aparaturnya Desa. Penerima PKH yaitu ibu Jumisri, ibu Tri, ibu Suparmi, ibu Ersi, ibu Atin, ibu Sumarni, ibu Suci, ibu Rias, ibu Aris, ibu Wahyuni, ibu Nurhayati, pak agus, dan ibu Wiji selaku masyarakat, pak Dodi irawan dan ibu Jumaroh selaku pendamping PKH dan bapak Junaidi selaku kepala desa rajabasa lama.

Mengingat penerima bantuan PKH didesa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu berjumlah 514 peserta dari 11 dusun, sehingga peneliti menggunakan teknik sampling menggunakan snowball sampling. Snowball sampling yaitu teknik yang penentuan sampelnya bermula dari jumlah kecil ke jumlah yang besar hingga data yang diberikan dirasa cukup lengkap.² Dimana peneliti mendatangi rumah yang mendapat PKH rumah masyarakat, ke kantor Desa/ kerumah kepala Desa dan ke kantor sekretariat PKH.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³ Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku dan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

² Sugiyono, *Metode Penelitian*.134

³ Sugiono. 225

jurnal yang berkaitan dengan program pemerintah terkait dengan peran PKH . berikut buku dan jurnal dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- b. Data penerima PKH tahap satu didesa rajabasa lama
- c. Raba menggaungkan, Akuntabilitas Konsep dan Implementasi
- d. Akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada UPK-G, Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol. 6 No 2 (2017).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Wawancara yaitu percakapan dengan yang dilakukan dua pihak atau lebih antara yang memberi pertanyaan dan yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur atau dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar cakupan topic yang luas. Pada wawancara ini peneliti mewawancarai bapak Junaidi selaku kepala desa, bapak Dodi Irawan dan ibu Jumaroh selaku

⁴ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 67

pendamping PKH didesa Raja basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu, ibu Jumisri, ibu Tri, ibu Suparmi, ibu Ersi, ibu Atin, ibu Sumarni, ibu Suci, ibu Rias, ibu Aris, ibu Wahyuni, ibu Nurhayati, pak Agus, selaku penerima bantuan Program Keluarga harapan didesa Rajabasa lama dan ibu Wiji selaku masyarakat. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang Akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁵ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa profil Desa Rajabasa Lama, data penerima PKH, pedoman pelaksanaan PKH, peraturan PKH gambar serta rekaman suara.

D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan

⁵ Abubakar.Rifa'i. 114

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.⁶

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir model Miles and Huberman mengenai Akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan disesa rajabasa lama kecamatan labuhan ratu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penyajian data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model dari Miles and Huberman yang membagi langkah dalam menganalisis menjadi beberapa bagian yaitu, pengumpulan data (*data collection*), Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁷

1. Pengumpulan Data (*Data Colection*)

Pada analisis model pertama yaitu dilakukan pengumpulan data hasil wawancara mendalam, observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang ada dilapangan.

⁶ AbubakarRifa'i. 121

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2021. 321

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi, reduksi data ini berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan tindakan agar mudah dipahami. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Rajabasa Lama

Desa Rajabasa Lama berdiri pada tahun 1402 M bertepatan pada tahun 809 H yang berlokasi di Way Terusan di wilayah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang didirikan oleh "Minak Pemuko Ratu Dibumi". Pada tahun 1852 H/ 1266 M, nenek moyang Rajabasa berpindah/ bermigrasi dari Way Terusan menuju Way Pengadungan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang pada saat itu dipimpin oleh "Pengiran Dalem Mengkurat" atau "Minak Gedei", akan tetapi ada beberapa keluarga yang menuju Way Swikis dan membentuk desa yang hingga saat ini dikenal dengan nama Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan ada pula yang melanjutkan perjalanan menuju ke Way Curup dan membentuk Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur hingga sekarang.¹

Meskipun banyak masyarakat Rajabasa yang telah berpindah dan membentuk desa baru, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tinggal di Way Pengadungan terutama para tokoh-tokoh/penyimbang-penyimbang tuanya. Dan pada tahun 1909 M bertepatan pada tanggal 13 Dzulhijah tahun 1329 H semua masyarakat yang masih berada di Way

¹Dokumen Desa Rajabasa Lama, 13 Maret 2023.

Pengadungankembali bermigrasi menuju Way Bagul yang pada saat itu dipimpin oleh "Pengiran Sampurno Jayo" dan menetap pada lokasi tersebut sampai saat ini.

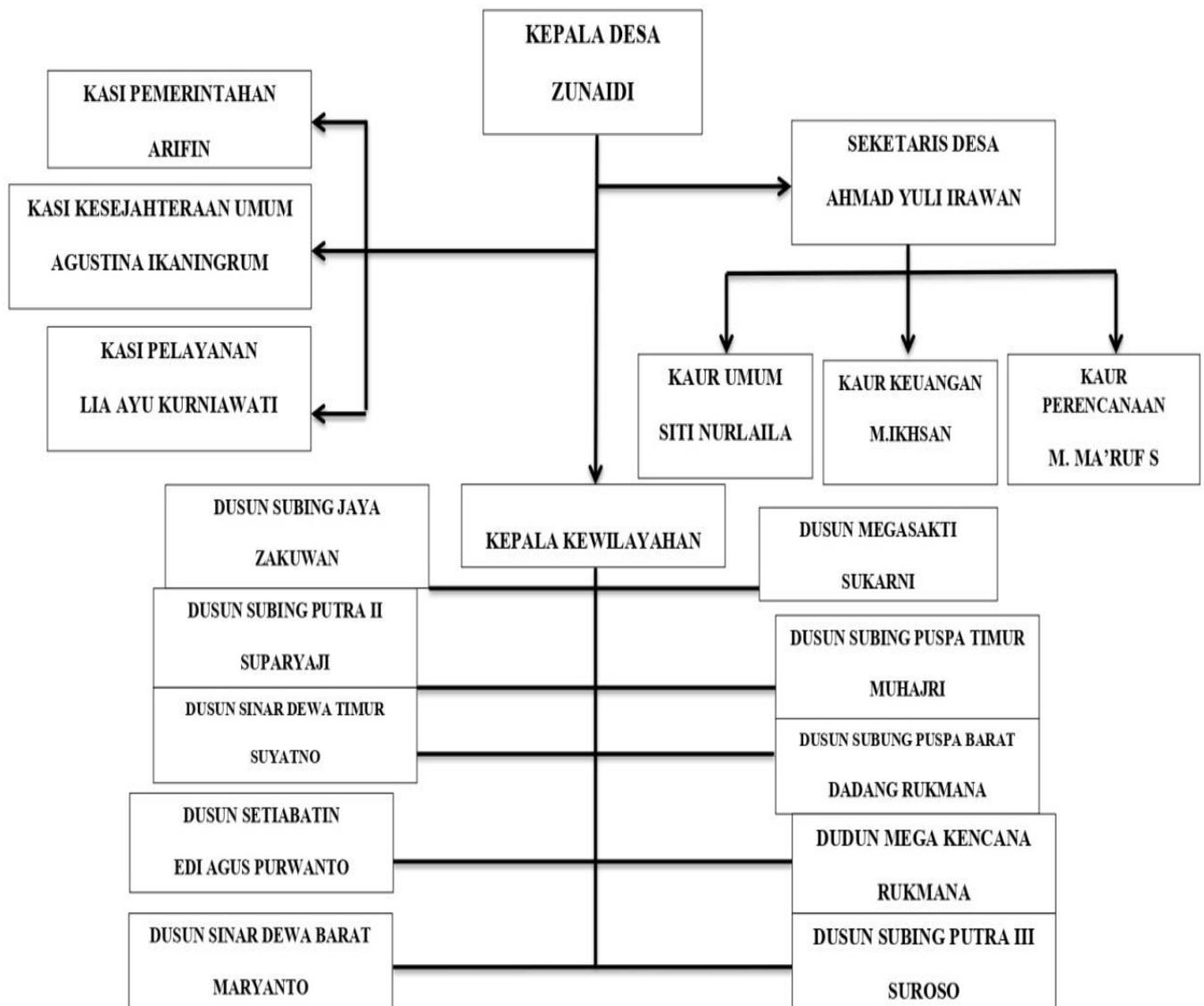
Sehubungan dengan para tokoh/ penyimbang yang dituakan banyak yang ikut bermigrasi ke Way Bagul dan bertempat paling lama di wilayah desa ini yang sebelumnya dikenal dengan nama Desa Rajabasa akhirnya berganti menjadi Desa Rajabasa Lama hingga saat ini.²

2. Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama

Struktur organisasi berperan penting dalam suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu lembaga. Struktur organisasi diperlukan agar memudahkan masyarakat mengetahui siapa yang memiliki weenang dan menjadi pedoman akan pertanggungjawaban tugas dan wewenang. Sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Adapun struktur organisasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur

²Dokumen Desa Rajabasa Lama.



Gambar 4. 1 STRUKTUR ORGANISASI DESA RAJABASA LAMA

Lurah/kepal Desa Rajabasa Lama yang pertama yaitu Pengiran Sempurno Jayo masa pemerintahannya pada tahun 1907, dan sudah 1 kali berganti hingga sekarang. Didesa Rajabasa lama memiliki luas 6.399,2 Ha dan terdapat 10 dusun diantaranya yaitu : Subing jaya, subing putra II, subing putra III, sinar dewa timur, sinar dewa barat, setia batin, megasakti, subing puspa timur, subing puspa barat, dan mega kencana.

Batas wilayah Desa Rajabasa lama yaitu:

Sebelah Utara : Desa Rajabasa Lama I dan Desa Rajabasa Lama II

Sebelah Selatan : Desa Labuhan Ratu VIII

Sebelah Barat : Desa pakuan aji kecamatan Sukadana

Sebelah Timur : Desa Labuhan Ratu Induk

Luas lahan Pertanian

Sawah tadah hujan : kurang lebih 1.646 Ha

Ladang/Tegal : kurang lebih 2.050 Ha

Lain-lain : kurang lebih 950 Ha

Luas lahan pemukiman kurang lebih 1.752 Ha, dengan didominasi oleh ladang/tegal sebagai mata pencaharian masyarakat didesa Rajabasa lama. Mata pencaharian masyarakat desa rajabasa lama mayoritas sebagai buruh tani, baik sawah ladang maupun tegalan, dengan hasil pertanian utama yaitu padi dan singkong.³

Jumlah penduduk yang ada di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Desa Rajabasa Lama

Jumlah Penduduk	11.779	Jiwa
Laki-Laki	5.845	Orang
Perempuan	5.934	Orang
Balita	726	Anak

Berdasarkan data monografi diatas, jumlah penduduk perempuan didesa rajabasa lama lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.⁴

³Dokumen Desa Rajabasa Lama.

⁴Dokumen Desa Rajabasa Lama.

B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementerian Sosial dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah akses kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan RTM (Rumah Tangga Miskin) dengan mengubah perilaku dan kecakapan SDM. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM (Rumah Tangga Miskin) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi kriteria komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.⁵

Program Keluarga Harapan ini dilakukan di Desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu terhitung sejak tahun 2014 yang penyaluran bantuan tersebut masih melalui kantor pos dan pada tahun 2018 KPM (Keluar Penerima Manfaat) diberikan kartu ATM sehingga bisa di ambil di mana saja.⁶

1. Dasar Hukum

Dalam setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki sanksi yang harus dipertanggungjawabkan yang sudah ditetapkan. Pengambilan dana bantuan PKH melalui dikantor pos, sebenarnya 1 hari kerja namun masih

⁵Kementerian Sosial, *Petunjuk Teknis Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial* (Kementerian Sosial, 2020). 7-12

⁶Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH, 30 Agustus 2023.

rentan terjadi penyelewengan. Ketika dalam penyaluran bantuan PKH tersebut terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pendamping maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana dan akan dikirimkan rekomendasi pemberian SP3 atau pemutusan kontrak kerja. Setelah adanya sanksi harus mengembalikan uang yang telah digelapkan dan pemberhentian tersebut, jika petugas tersebut tidak bisa mengembalikan uang yang telah digelapkan, maka sanksi berikutnya yaitu akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses ke hukum yang lebih lanjut.⁷

Dasar hukumnya terdapat dalam peraturan menteri sosial No. 1 tahun 2018 tentang PKH, ada juga pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kebijakan tersebut ditentukan oleh pusat maka pedoman pelaksanaan tidak ditentukan setiap berapa tahun harus berubah, jika dirasa perlu ada perubahan maka akan ada surat resmi.”⁸ Dasar hukum yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH antara lain: Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai, Undang-undang Nomer 11 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Dan peraturan desa nomer 02 tahun 2020 tentang pembentukan Desa.

⁷Jumaroh.

⁸Dodi Irawan, Wawancara dengan Pendamping PKH, 1 September 2023.

2. Prosedur Pelaksanaan dan Penyaluran PKH

Prosedur pelaksanaan PKH terdiri atas pertemuan awal, sosialisasi, validasi, verifikasi, penyaluran, pemutakhiran data. Menurut penuturan pendamping PKH, alur pelaksanaan PKH yang dipakai sekarang terdiri dari 6 tahapan yaitu pertemuan awal, sosialisasi, validasi, verifikasi, penyaluran, pemutakhiran data.

a. Pertemuan Awal

Pada tahap pertemuan awal dilakukan untuk melihat data yang tertera di DTKS sesuai dengan bukti serta kondisi terkini calon KPM PKH sehingga memperoleh data yang valid sebagai acuan pemberian bantuan kepada calon KPM. Data tersebut oleh Pendamping PKH akan dikirim melalui aplikasi e-PKH untuk disortir siapa yang benar – benar layak menerima bantuan PKH. Selain itu, pada pertemuan awal juga dilakukan kegiatan sosialisasi yang berisi informasi mengenai tujuan PKH, syarat untuk menjadi KPM, hak dan kewajiban KPM, sanksi yang akan diterima oleh KPM apabila tidak memenuhi kewajibannya, jadwal penyaluran bantuan PKH, serta menyampaikan bagaimana mekanisme pengaduan dan pelaporan atas keluhan terhadap pelaksanaan PKH.⁹

b. Sosialisasi

Pendampingan/sosialisasi dilakukan agar tujuan PKH tercapai yaitu masyarakat yang sejahtera. Pendampingan yang dilakukan tidak

⁹Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.

hanya ketika KPM mengalami kendala dalam mengakses segala fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kendala ketika KPM tidak dapat melakukan pencairan karena adanya permasalahan pada data KPM yang terdaftar, namun juga dilakukan dengan adanya kegiatan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kualitas Keluarga (P2K2).¹⁰

Wawancara dengan ibu jumaroh sosialisasi ada yang namanya P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan setiap bulan, karena banyak materi yang harus disampaikan misal, materi ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, stanting bahkan banyak materi yang diberikan oleh pendamping yang diberikan kepada KPM PKH melewati pertemuan kelompok atau Family Development Session (FDS).¹¹

Pada pertemuan P2K2 (pertemuan peningkatan kualitas keluarga) KPM diberikan modul untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan yang tepat dan efisien, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi ekonomi mengenai bisnis kecil skala rumahan yang diharapkan dapat mendorong KPM untuk melakukan wirausaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan KPM sehingga pendapatannya meningkat dan segera tergraduasi. Modul tersebut terdiri dari modul pendidikan,

¹⁰Kementrian Sosial, *Petunjuk Teknis Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial*.15-16

¹¹Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH. 30 Agustus 2023

modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul pengolahan keuangan dan perencanaan usaha, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, dan modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia.

Bentuk pendampingan yang diberikan oleh pendamping berbeda-beda, salah satunya ketika ada anak sekolah yang putus sekolah maka diberikan motivasi agar mau bersekolah. Pendampingan juga dilakukan ketika KPM mengalami permasalahan dalam pencairan dana karena adanya perbedaan data yang tercantum dalam DTKS dengan KK atau KTP. Selain itu, pendampingan dilakukan juga dalam bentuk pertemuan kelompok (PK) dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Pertemuan kelompok dilakukan secara rutin setiap bulan yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai aturan PKH serta akses terhadap fasilitas layanan yang diberikan sebagai hak KPM¹².

c. Validasi

Pada tahap validasi dilakukan pada calon KPM yang hadir dan diundang pada tahap pertemuan awal. Bagi yang tidak hadir dilakukan kunjungan kerumah. Nama-nama yang sudah ditetapkan oleh pusat atau kementerian sosial kemudian di cocokkan apakah sudah valid antara kondisi lapangan dengan data tersebut, masih ada komponennya atau tidak karena PKH ini bantuan tunai bersyarat, untuk sumber datanya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), untuk

¹²Jumaroh.

sekarang DTKS itu ada desilnya/tingkatanya desil 1 desil 2 desil 3 desil 4 tingkat kemiskinan atau kesejahteraan seseorang itu diukur disitu. KPM yang berada dalam desil 1 itu otomatis semua bantuan dapat.¹³

d. Verifikasi

Verifikasi itu bertujuan agar KPM memenuhi kewajibannya karena sudah mendapat bantuan PKH. Kewajibannya itu misal seperti KPM yang punya komponen ibu hamil dan balita itu wajib periksa ke posyandu setiap bulan, kalau yang disabilitas dan lansia wajib ikut program kesejahteraan sosial, kalau yang komponen Pendidikan berarti wajib menempuh Pendidikan minimal 12 tahun dan hadir minimal 85% dari hari aktif sekolah.¹⁴ Pendamping akan mengecek apakah dia komit atau tidak, caranya dengan melihat buku posyandu, melihat daftar hadir kegiatan kesejahteraan sosial, dan melihat rapor anak. Verifikasi komitmen akan di entri oleh Pendamping PKH ke aplikasi-PKH sebagai dasar penerusan, penangguhan, ataupun penghentian pemberian bantuan.¹⁵

e. Penyaluran dana bantuan

Pencairan dana bantuan PKH dilakukan secara non tunai dalam 4 tahap dan disalurkan setiap 3 bulan sekali, dengan jumlah yang diterima oleh setiap KPM berbeda – beda tergantung dari komponen

¹³Jumaroh.

¹⁴Jumaroh.

¹⁵Kementerian Sosial, *Petunjuk Teknis Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial*. 1.13

PKH yang dimiliki. Bapak Dodi mengatakan pada saat pencairan dapat diambil KPM dimana saja karena pencairannya sudah melalui ATM/KKS masing-masing. Untuk pencairan setiap komponen berbeda-beda misal komponen ibu hamil Rp.3.000.000/tahun, balita Rp. 3.000.000/tahun, anak SD Rp. 900.000/tahun, SMP/ sederajat Rp. 1.500.000/tahun, SMA/ sederajat Rp. 2.000.000/tahun, disabilitas berat Rp. 3.000.000/tahun, lansia Rp. 2.400.000/tahun.¹⁶

Pencairan tersebut dilakukan melalui ATM/KKS masing-masing agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan. Pada saat bantuan tersebut cair (saldo 0) terdapat beberapa KPM yang bantuannya tidak keluar karena memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu NIK belum badan dukcil, belum aktif dapodik, tidak masuk DTKS/non DTKS, kode atau nama wilayah anomali, data anomali. Tahun ini dinas sosial mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan bahwa apabila dalam kartu keluarga pengurus (Keluarga Penerima Manfaat) terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki gaji UMR/UMK/UMP atau terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan maka semua bantuannya akan otomatis dinonaktifkan oleh sistem.

Pendamping dikasih wewenang untuk menonaktifkan KPM yang sudah meninggal, namun sekarang sudah otomatis karena data PKH dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu sinkron dengan dapodik, data sekolah, simpatika, sehingga untuk yang

¹⁶ Dody Irawan, Wawancara dengan Pendamping PKH. 1 September 2023

meninggal dirumah sakit otomatis BPJS nya di off dari rumah sakit nah dia otomatis PKHnya off dengan sendirinya. Untuk yang meninggal dirumah pendamping melapor kedesa atau bisa diakses pendamping melalui SIKS-NG pada menu kelayakan bahwa KPM tersebut meninggal. Namun untuk anak sekolah sudah otomatis jadi yang sudah lulus atau sudah tidak punya anak sekolah PKH nya otomatis non eligible karena keluar dari data sekolah, dapodik, simpatika.¹⁷

Terdapat banyak kendala yang dialami oleh KPM disebabkan oleh beberapa hal dan masalah tersebut mengakibatkan saldo 0 atau bantuan tidak keluar. Seperti yang dikatakan oleh ibu jumaroh selaku pendamping PKH bahwa permasalahan orang yang satu dengan orang yang lain berbeda misalnya anak sekolah yang pindah sekolah dari dapodik ke simpatika dari sekolah negeri ke swasta agama itu belum diproses atau terhambat disimpatika otomatis karna didapodik sudah tidak ada disimpatika dia belum masuk akhirnya bantuannya tidak keluar. Kejadian suami istri lansia si mbah putri ini sebagai pengurus dia meninggal di rumah sakit sama BPJS kan otomatis di off kan jika BPJS off otomatis bantuan yang lain juga off, agar dapat bantuan lagi harus mulai dari awal yaitu memasukan data ke DTKS. Contoh kasus saldo 0 ada lagi NIK ganda, data tidak padan capil, dan setelah pepadanan data, data DTKS dipadankan dengan dukcapil dipadankan

¹⁷Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH. 30 Agustus 2023

dengan dapodik setelah itu banyak KPM yang saldo 0. Kasus KPM yang komponen yang didalamnya sudah meninggal namun masih mendapat bantuan itu disebabkan karena meninggal dirumah dan data tersebut belum diperbarui.

Pada penerima PKH setiap dusunnya akan ditunjuk untuk menjadi ketua yang bertujuan agar saat ada informasi atau terkait masalah yang dialami ketua akan memberikan laporan kepada pendamping. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri Wahyuni Pada saat ada masalah terkait PKH ketua kelompok KPM PKH melaporkan kepada pendamping guna memproses dan mencari solusi apa yang harus dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh ibu dwi Sri Wahyuni bahwasanya pendamping PKH melakukan sosialisasi setiap bulannya dan untuk pelaporan kepada pendamping dilakukan ketika pencairan saja. Namun untuk KPM yang meninggal kalo masih ada ahli warisnya tidak apa-apa kecuali lansia tunggal kalo udah meninggal tidak apa-apa kalo diputus. Dan antara aparatur desa dengan pendamping selalu merespon dengan baik apa yang dilaporkan tersebut.¹⁸

Data dalam DTKS akan slalu dilakukan pemutahiran data, bertujuan karena agar data dalam DTKS tersebut sesuai dengan kenyataan atau fakta nya. Ibu Rias mengatakan bahwa pencairan tahun ini banyak yang mengalami keterlambatan disebabkan karena perubahan komponen dari balita ke SD dan data yang tidak sesuai

¹⁸Dwi Sri Wahyuni, Wawancara dengan Penerima PKH, 5 September 2023.

sudah proses perbaikan. Pendamping melakukan sosialisasi memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut itu dilakukan setiap bulannya dan KPM PKH yang sudah meninggal tetapi masih menerima bantuan tersebut karena data masih belum di update.¹⁹

Awal bantuan PKH masuk proses pencairannya masih melalui kantor pos dengan proses 1 hari kerja, namun pencairan tersebut menimbulkan penyelewengan sehingga diberikan ATM agar memudahkan KPM dalam penarikan. Bapak agus mengatakan untuk nominal penerima PKH tersebut tergantung dengan komponen yang ada didalam satu rumah jika dalam suatu rumah terdapat balita SD SMP maka yang didapat jumlahnya juga besar. Dan masyarakat yang komponen didalamnya sudah tidak ada namun saat pencairan masih menerima berarti proses pemutahiran data nya belum dilakukan karna pihak pendamping hanya melaporkan dan yang meng acc dari pihak kemensos.²⁰

Penererima PKH haarus bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik, dan memanfaatkan materi atau penjelasan yang diberikan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Jumisri, dana yang diberikan kepada KPM masih berkuat untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya. Setiap sosialisasi pendamping selalu membereikan materi, arahan untuk menggunakan dana tersebut dengan baik dan selalu memberikan penjelasan terkait KPM yang masih menerima bantuan

¹⁹Rias, Wawancara dengan Penerima PKH, 10 September 2023.

²⁰Agus, Wawancara dengan Penerima PKH, 10 September 2023.

mungkin datanya belum masih di proses dan untuk lansia yang tidak mendapat bantuan apapun namun sudah pernah dilakukan pendataan dan masih diproses karna setelah dilakukan pendataan tidak langsung mendapat bantuan.²¹

Pada proses pemutahiran data memerlukan waktu lama sehingga terdapat data yang seharusnya sudah tidak dapat bantuan namun masih mendapatkan bantuan tersebut karena belum dilakukan pembaruan atau masih dalam proses sehingga jika pembaharuan sudah selesai otomatis tahun depan atau tahap berikutnya tidak akan dapat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Aten bantuan ini bersumber dari pusat jika lansia tersebut sudah didata tapi belum mendapatkan bantuan mungkin datanya belum dimasukkan atau memang masih diproses dan memang rezeki si penerima bantuan.”²²

Dalam proses pencairan terdapat KPM yang mengalami saldo 0, penyebab terjadinya saldo 0 berbeda-beda ada yang data yang tidak padan dan lainnya. Yang disampaikan oleh ibu Sumarni bahwa jika masih mendapat bantuan namun komponen sudah tidak ada mungkin masih ada pewarisnya sehingga KPM tersebut masih menerima bantuan. Pewaris tersebut akan mendapat bantuan jika masih dalam satu kartu keluarga sehingga jika pewaris tersebut sudah masuk kriteria maka bantuan akan tetap cair.²³

²¹Jumisri, Wawancara dengan Penerima PKH, 10 September 2023.

²²Aten, Wawancara dengan Penerima PKH, 15 September 2023.

²³Sumarni, Wawancara dengan Penerima PKH, 12 September 2023.

Graduasi mandiri yaitu dimana berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonomi meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak mendapat PKH. Graduasi mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif sendiri ataupun dorongan pendamping. Seperti yang dikatakan ibu Nur Hayati Graduasi mandiri ini dilakukan agar yang belum mendapat bantuan bisa mendapat, untuk bantuan PKH pada tahap ini banyak yang belum cair sehingga pendamping melakukan pertemuan terhadap KPM yang belum cair kenapa bantuan tersebut tidak cair. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan setiap bulan yang dilakukan di rumah ketua kelompok. Kasus yang terjadi seorang lansia meninggal dunia kemudian masih ada penerusnya dan penerusnya tersebut sudah dikategorikan lansia sehingga bantuan PKH tersebut masih bisa cair.²⁴

Dalam menjalani tugas baik aparatur desa maupun pendamping PKH harus melayani masyarakat dengan ramah tanpa kekerasan, jika pelayanan yang diberikan baik maka masyarakat akan nyaman. Seperti yang dikatakan oleh ibu Suci sikap yang ramah dan baik dalam mengayomi masyarakat dan ketika terdapat masyarakat yang melakukan pengaduan akan ditanggapi dengan baik. Begitu juga dengan sikap pendamping terhadap KPM PKH maupun masyarakat yang lainnya. Sehingga ketika terdapat kasus yang pendamping akan menjelaskan sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Penjelasan yang

²⁴Nurhayati, Wawancara dengan Penerima PKH, 15 September 2023.

dilakukan pendamping membuat peserta PKH lainnya menjadi tahu dan tidak salam paham.²⁵

Masyarakat yang mendapat bantuan PKH harus dapat berfikir dengan jernih karena jika dalam penyaluran terdapat kendala harus bisa berfikir dari sudut pandang lain dan tidak menyalahkan petugas ataupun pendamping. Seperti yang disampaikan oleh ibu Tri Handayani dan ibu Ersi tahun ini penerima PKH banyak yang mengalami saldo 0 dikarenakan tahun ini yang bekerja di PT akan dinyatakan mampu padahal kenyataannya berangkat bekerja seminggu dua kali tidak setiap hari masuk. Yang masih menerima bantuan itu masih rezekinya dan orang yang komponennya tidak ada tapi masih mendapat bantuan itu mungkin datanya data lama belum diperbarui.²⁶

Tahun ini banyak KPM yang mengalami saldo 0 hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mata pencahariannya buruh di PT. Selain itu seperti yang disampaikan oleh ibu Ersi bahwa rata-rata masyarakat rajabasa lama itu bekerja sebagai buruh di PT dan tidak setiap hari kerjanya jadi bakal banyak lagi yang bakal ngalamin saldo 0. Selama mendapat bantuan juga bu ersi selalu mendapat pelayanan dengan baik dan masyarakat yang sudah tidak ada komponennya tapi masih mendapat bantuan dulu pernah ada namun data yang digunakan

²⁵Suci, Wawancara dengan Penerima PKH, 13 September 2023.

²⁶Tri Handayani, Wawancara dengan Penerima PKH, 10 September 2023.

data lama seperti KK nya masih terdapat nama anaknya sehingga bantuan tersebut masih keluar.²⁷

Seperti wawancara dengan ibu Suparmi bawasannya jika komponennya sudah tidak ada maka akan otomatis of karena bantuan pkh tersebut bantuan bersyarat. Namun jika masih mendapat data yang disetor data lama sehingga masih mendapat bantuan. Sekarang banyak yang mengalami saldo 0 karena didesa rajabasa lama banyak yang bekerja sebagai buruh diPT jadi jika yang bekerja di PT dianggap mampu maka akan banyak yang mengalami saldo 0 tersebut.²⁸

Masyarakat yang tergolong kedalam lansia tunggal namun tidak mendapat bantuan akan diusulkan oleh aparaturnya desa setempat sehingga bisa mendapatkan bantuan. Seperti yang dikatakan oleh mbah wiji bahwa beliau tidak mendapatkan bantuan apapun sekarang. Jika dilihat dari syarat penerima PKH mbah wiji tersebut sudah layak untuk mendapat bantuan.²⁹

Sehingga dengan banyak yang mengalami saldo 0 ini penerima PKH di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu ini akan mengalami penurunan dikarenakan banyak dari masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh di PT tersebut.

f. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH yang digunakan sebagai dasar

²⁷Ersi, Wawancara dengan Penerima PKH.

²⁸Suparmi, Wawancara dengan Penerima PKH, 16 September 2023.

²⁹Mbah Wiji, Wawancara dengan Masyarakat, 15 September 2023.

program perlindungan sosial. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan oleh Pendamping PKH agar mengetahui kondisi terkini dan mengupdate perubahan informasi dari KPM PKH. Perubahan tersebut antara lain perubahan status eligibilitas KPM, perubahan komponen PKH, perubahan domisili, perubahan kondisi sosial ekonomi, dan sebagainya. Pada perubahan tersebut pendamping melaporkan ke dinas sosial. Entri data dilakukan melalui e-PKH oleh pendamping PKH setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM berdasarkan kunjungan dan pertemuan yang dilakukan setiap bulannya.³⁰

C. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidak tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintahan yang baik dan jujur telah mendorong pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban sehingga dapat terjadi sesuai dengan Peraturan menteri sosial nomer 1 tahun 2018. Berikut adalah indikator untuk mengukurnya antara lain:

1. Legitimasi Bagi Para Pembuat Kebijakan

Dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik, tentu ada beberapa hal yang harus dicapai oleh lembaga pemerintah. Salah satu prinsip dalam mewujudkan tata kelola yang baik yaitu akuntabilitas. prinsip dasar yang digunakan dalam suatu kegiatan, dimana pelaksanaan

³⁰Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH.30 Agustus 2023

kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan secara hukum. Dalam pelaksanaan sebuah program, selalu dilandasi dengan peraturan yang sudah ditetapkan, begitu pula pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu.

Dasar hukum yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH seperti yang dikatakan oleh pendamping PKH antara lain, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai, peraturan menteri sosial No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Undang-undang Nomer 11 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Dan peraturan desa nomer 02 tahun 2020 tentang pembentukan desa.³¹

Berdasarkan pada peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya pasal 1 ayat 7 menyatakan penyaluran bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani program PKH. Selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) bahwa penyaluran bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 penyaluran dilakukan secara nontunai. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang bersifat nontunai tersebut tentunya bersifat bantuan barang kebutuhan

³¹Irawan, Wawancara dengan Pendamping PKH.

pokok atau bantuan pelayanan kesehatan. Penyaluran dari bantuan-bantuan tersebut memerlukan adanya keterlibatan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah desa sehingga masyarakat yang tidak mampu tidak lagi mengeluarkan biaya dalam menerima bantuan program PKH.³²

Berdasarkan wawancara tersebut dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya berpatokan dengan satu peraturan saja yaitu terdapat beberapa peraturan yang digunakan antara lain yaitu Petunjuk Teknis penyaluran bantuan sosial non tunai PKH oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020 yang terakhir. Serta juga menggunakan Buku Pedoman Program Keluarga Harapan.

2. Keberadaan Kualitas Moral yang Memadai

Dalam suatu pemerintahan terdapat pegawai yang harus memiliki kualitas moral yang baik, kualitas moral yang baik sangat penting baik dalam melayani maupun yang lainnya. Jika aparatur desa atau pendamping memiliki moral yang baik maka tidak akan bersikap semena-mena. Dari wawancara yang dilakukandengan penerima PKH atau masyarakat bahwa pemerintah desa maupun pendamping PKH selalu bersikap baik dan melayani dengan ramah tanpa ada kekerasan. Apabila terdapat masyarakat yang komplain aparatur desa ataupun pendmping PKH akan menjelaskan apa yang menjadi maslah masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Rajaba Lama yang dijelaskan oleh ibu Sri Wahyuni mengatakan

³²“Peraturan Menteri Sosial Repubil Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan”, 18-21

selama ini ketika membutuhkan atau ada perlu dengan aparatur desa selalu dilayani dengan baik dan selalu bisa diajak bermusyawarah.³³ seperti yang disampaikan oleh ibu Suci bahwa sikap pendamping selama ini slalu baik ketika ada keluhan maka pendamping akan menjelaskan terkait masalah tersebut.³⁴

3. Kepekaan

Kepekaan dalam pelaksanaan program keluarga harapan atau pelayanan publik yang lainnya ditunjukkan kepada pendamping ataupun aparatur pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang selalu menerima saran dan juga kritik ketika meminta pelayanan. Pendamping PKH maupun aparatur desa selalu menanggapi dengan baik keluhan KPM maupun masyarakat dalam permasalahan bantuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pendamping PKH ketika terdapat masyarakat ataupun KPM yang komplain atau mengalami masalah pendamping akan menjelaskan dan mencarari tahu apa penyebabnya. Penerima PKH ibu rias mengatakan bahwa selama pendampingan selalu memberikan respon atau penjelasan yang baik sehingga ketika ada masalah pendamping akan terjun langsung kelapangan.³⁵

4. Keterbukaan

Dalam aspek keterbukaan ini erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparatur Desa dalam melakukan pelayanan kepada

³³Wahyuni, Wawancara dengan Penerima Pkh.

³⁴Suci, Wawancara dengan Penerima PKH

³⁵Rias, Wawancara dengan Penerima PKH.

masyarakat. Keterbukaan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Rajabasa Lama bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pelaksanaan PKH, syarat menjadi PKH, komponennya apa saja, serta hak dan kewajiban KPM PKH.

Pelaksanaan PKH mulai dari pendaftaran hingga penyaluran tertera dalam modul pedoman pelaksanaan PKH yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Modul tersebut bisa dilihat oleh masyarakat maupun KPM, sehingga KPM maupun masyarakat paham mengenai proses pelaksanaan PKH dan apa saja syarat serta komponen yang mendapat PKH. Aparatur desa membantu masyarakat untuk memasukkan data ke DTKS agar data tersebut terbaca oleh dinas sosial sehingga dapat diusulkan untuk menerima bantuan sosial. Seperti yang disampaikan oleh pendamping PKH bahwa pelaksanaan PKH atau ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).³⁶

5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal

Pelayanan yang akuntabel perlu dukungan sumber daya yang memadai, jika sumber daya tidak memadai akan menyulitkan proses pelayanan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber daya yaitu orang yang terlibat dalam proses PKH tersebut. Memberdaya gunakan aparat desa atau pendamping untuk meningkatkan proses pelayanan. pendamping PKH yang berada di Labuhan Ratu terdapat 9 orang oleh

³⁶Irawan, Wawancara dengan Pendamping PKH.

karena itu setiap pendamping memiliki wilayahnya sendiri untuk pendampingan. Dalam pelaksanaan PKH ini pendamping selalu melakukan pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan setiap bulannya dan melakukan pengecekan langsung kondisi dilapangan. Seperti yang disampaikan oleh pendamping PKH bahwa pemutahiran data dilakukan untuk mengetahui fakta kondisi dilapangan yang terjadi.³⁷

6. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PKH harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Aparatur desa dalam menentukan masyarakat yang akan mendapat bantuan harus sesuai dengan kriteria. Penerima manfaat PKH yang layak yang sesuai dengan data-data yang sudah ditetapkan oleh pusat. Proses data yang di usulkan untuk penerima PKH sudah di evaluasi dan diperbaharui agar penerima bantuan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Data PKH yang dikeluarkan oleh DTKS sekarang sudah sinkron dengan dapodik simpatika dukcapil sehingga data yang diberikan sesuai, jadi ketika terdapat data yang salah KPM akan mengalami saldo 0 sehingga saat pencairan nama yang sudah sinkron yang akan mendapat bantuan. Ketika pendaftaran sampai dengan penyaluran sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan sehingga pada saat pencairan akan tepat waktu. bukan hanya saat pencairan saja tetapi ketika pendampingan dilakukan harus sesuai jadwal agar masyarakat lebih memahami. Seperti

³⁷Irawan.

yang disampaikan oleh ibu jumaroh selaku pendamping PKH bahwa data penerima PKH tersebut dikeluarkan oleh kementerian sosial sehingga pada saat pencairan tersebut tepat waktu, pencairannya sendiri dilakukan setahun 4 tahap yang dilakukan per 3 bulan sekali. Sosialisasi sendiri rutin dilakukan karena banyak sekali materi yang harus disampaikan.³⁸

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Rajabasa Lama peran kepala desa dalam proses PKH ini tidak terlalu signifikan, karena peran kepala desa sendiri hanya saat proses pendaftaran dan pada saat penyalurn terjadi masalah maka kepala desa dengan pendamping akan turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak ada yang protes. Masyarakat yang protes ini tidak lain karena masalah saldo 0 atau sudah tidak mendapat bantuan lagi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Zunaidi selaku kepala desa Rajabasa Lama bahwasannya ketika saat pencairan dan terjadi masalah atau yang saldo 0 saya akan kordinasi dengan pendamping untuk menjelaskan kepada KPM kenapa tidak mendapat bantuan lagi. Pada saat pencairan tahap ini banyak KPM yang saldo 0 dari 800 an KPM menjadi kurang lebih 600 an KPM dan kemungkinan akan berkurang lagi.³⁹

Pencairan yang dilakukan per tiga bulan sekali ini pencairannya langsung melalui ATM/KKS masing-masing sehingga mengurangi tindakan kecurangan. Pada tahap ini banyak KPM yang tidak mendapat bantuan dikarenakan status pekerjaan yang menjadi buruh di PT. Seperti yang

³⁸Jumaroh, Wawancara dengan Pendamping PKH.

³⁹Zunaidi, Wawancara dengan Kepala Desa.

disampaikan oleh bapak kepala desa bahwa kemensos memonitor pendapatan sudah UMP. Dan kasus saldo 0 yang terjadi pada tahap ini terjadi karena banyak dari masyarakat/KPM yang bekerja jadi buruh di PT, sehingga pihak PT mengonlinekan data tersebut dengan perhitungan Harian Lepas (HL). Jika HL yang ditetapkan pihak PT Rp.100.000 maka jika 25 hari kerja maka itu sudah di UMP. Namun kenyataannya buruh di PT ini berangkat terkadang Cuma 2 hari dalam seminggu. Itulah yang mengakibatkan banyak yang mengalami saldo 0.⁴⁰

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan PKH ini dilihat dari 6 indikator tersebut sudah akuntabel karena dalam pelaksanaan tersebut pendamping atau aparatur desa mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam penyaluran pun jarang terjadi masalah. Setelah semua data sinkron dengan dapodik, simpatik, dukcapil DTKS banyak yang mengalami masalah dari NIK tidak padan dukcapil, NIK ganda, dan lainnya namun pendamping merespon dengan baik keluhan KPM dan mencari solusinya. Hal ini juga didukung dengan peran kepala desa terkait dengan proses penyaluran bantuan sudah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh dinas sosial, namun seiring waktu terdapat ketentuan baru sehingga membuat KPM banyak yang sudah tidak mendapat bantuan lagi.

⁴⁰Zunaidi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja pendamping mampu menunjukkan akuntabilitasnya dalam pelaksanaan PKH di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu hal ini terlihat dalam pemenuhan enam indikator yang berkaitan dengan legitimasi bagi pembuat kebijakan, keberadaan kualitas moral yang memadai, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas. Kinerja yang dilakukan tersebut sudah akuntabel dan sesuai dengan peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomer 1 tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu meliputi:

1. Bagi KPM, apabila terdapat tanda – tanda adanya penyelewengan dana bantuan PKH hendaknya segera melapor agar dapat segera ditindak lanjuti sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana bantuan PKH.
2. Bagi Pendamping PKH, hendaknya mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan PKH di Desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Lampung timur
3. Bagi Pemerintah, semakin memperketat pengawasan jalannya penyaluran bantuan PKH, serta mempertegas hukum yang berlaku agar tidak ditemukan lagi kasus – kasus mengenai penyelewengan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agus. wawancara dengan penerima PKH, 10 September 2023.
- Alawiyyah, Syarifah, Unti Ludigdo, dan Aji Dedi M. "Akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada UPK-G." *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* Vol. 6 No 2 (2017).
- Alfasadun. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Prosiding SENDI, 2018.
- Arlina, Muhamad Guntur, dan Umar Nain. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus : PKH Bidang Pendidikan)." *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer* Vol. 9 No. 2 (2021).
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia*, 2022.
- Dokumen Desa Rajabasa Lama, 13 Maret 2023.
- Hartati, Andi, Herny Constatia Fanggide, Enita Binawati, Siti aisyah, Frits Oscar Fanggidaae, Helda Marlina Ala, Renya Rosari, Ffrits Isak Lake, Charli Sitingjak, dan Yudhit Febrianty L. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022.
- Hulfi, Kurnia Putri. *Akuntabilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)*. Universitas Jember, 2022.
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta, 2021.
- Kementrian Sosial. *Petunjuk Teknis Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Kementerian Sosial, 2020.
- KOMINFO RI. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta, 2011.
- Lengkong, Kevin I., Johny P. Lengkong, dan Trintje Lambey. "KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMBES 1 KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN

- MINAHASA.”*JURNAL EKSEKUTIF* volume 2, no.2 (5 April 2022).
Menggaungkan, Raba. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang:
UMMPress, 2020.
- Ndoda, Yohanis. “KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA KORI
KECAMATAN KODI UTARA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.”
jurnal Moderat volume 7, no. 3 (31 Agustus 2021).
- Paranoan, Selmita, Tuti Herawati, Yesika Yanuarisa, Meidy Santje selvy kantohe,
Ernawaty Usman, Ni Made Intan, monika Handayani, dkk. *Akuntabilitas
Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2022.
- Pratiwi, Endang Tri, Dewi Mahmuda, dan Ernawati Malik. “Analisis Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus Pada Inspektorat
Daerah Kota Baubau).” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas
Muhammadiyah Buton* 8, no.1 (26 Februari 2022)
- Rumawas, Wehelmina. *Manajemen Kinerja*. Manado: Unsrat Pres, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
2021.
- Tsauri, Sofyan. *Manajemen Kinerja (Performance management)*. Jember: STAIN
Jember Press, 2014.
- Undang-Undang Republik indonesia nomer 11 Tahun 2009. *Tentang
Kesejahteraan Sosial*, t.t.
- Yudi Astuti, Rahma, Mohamad Hafcar N, Muhamad Rifaldi, Diwa Haikal A,
Bagas Kurniawan T, Dimas Setyo Raharjo, Lesta Romdhoni, dkk.
Manajemen Kinerja. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2021.
- “Peraturan Menteri Sosial Repubil Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan,” t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3322/In.28.3/D.1/TL.00/10/2022 Metro, 03 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Era Yudistira (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Aini
NPM : 1903030015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Siti Zulaikha

OUTLINE

AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akuntabilitas
 1. Pengertian Akuntabilitas
 2. Indikator Akuntabilitas
- B. Kinerja
 1. Pengertian Kinerja
 2. Perencanaan Kinerja

3. Kinerja Kepala Desa
4. Indikator Kinerja
- C. Konsepsi Program Keluarga Harapan (PKH)
 1. Pengertian Program Keluarga Harapan
 2. Tujuan Program Keluarga Harapan
 3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan
 4. Landasan Program Keluarga Harapan
 5. Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
 6. Besar Bantuan Dana PKH

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
- C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2023
Peneliti,



NUR AINI
1903030015

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Era Yudistira, M,Ak
NIP. 19901003 201503 2010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA
KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

A. WAWANCARA

1. Pejabat Desa Rajabasa Lama
 - a. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang?
 - b. Apakah ada sanksi yang ditetapkan jika pelaksanaan program keluarga harapan tidak sesuai dengan aturan?
 - c. Pernah ada masalah apa selama penyaluran sampai kepala Desa turun langsung?
 - d. Apa yang pernah dilakukan terkait kendala/kesalahan pendataan dalam pelaksanaan PKH?
 - e. Bagaimana pendapatnya jika dalam penyaluran bantuan terdapat masyarakat yang tidak mendapat bantuan seperti lansia tunggal?
 - f. Bagaimana proses pendaftaran ke DTKS ?
 - g. apakah ada kendala yang dialami dalam pelaksanaan program keluarga harapan tersebut?
 - h. Bagaimana respon pejabat Desa dalam menanggapi masyarakat yang mengalami keluhan terkait pelaksanaan program tersebut?
 - i. Apa yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur Desa dalam pelaksanaan PKH?

2. Pendamping PKH Desa Rajabasa lama
 - a. Sejak kapan PKH dilaksanakan didesa rajabasa lama?
 - b. Apa bentuk pendampingan yang diberikan kepada KPM?
 - c. Apakah pendampingan/sosialisasi terhadap KPM PKH rutin dilakukan?
 - d. Apa yang dilakukan ketika peserta PKH sudah tidak sesuai dengan kriteria?
 - e. Bagaimana prosedur pelaksanaan PKH dilakukan?

- f. Apakah setiap akhir tahun dilakukan rapat koordinasi terkait dengan laporan pelaksanaan Program Keluarga harapan?
 - g. Bagaimana laporan tahunan terkait program keluarga harapan tersebut?
 - h. Bagaimana tanggapannya jika terdapat masyarakat yang komponennya sudah tidak ada namun masih menerima dana PKH ?
 - i. Bagaimana solusi dari masalah yang timbul selama penyaluran PKH?
 - j. Apa yang dilakukan pendamping jika pada saat pembagian dana bansos terdapat KPM yang rusuh?
 - k. bagaimana jika dalam penyaluran bantuan terdapat masyarakat yang mengadu?
 - l. Bagaimana peraturan/ dasar hukum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?
 - m. Apa sih yang membuat penerima bantuan tidak mendapat bantuan padahal komponen didalamnya sesuai?
3. KPM PKH Desa rajabasa lama
- a. Dari tahun berapa anda menjadi keluarga penerima manfaat dana PKH?
 - b. Termasuk kriteria apa yang anda dapatkan?
 - c. Berapa besaran bantuan yang anda terima?
 - d. Apakah tahap pencairan dana PKH tepat waktu?
 - e. Apakah pendamping PKH atau pejabat desa rutin melakukan sosialisai atau pendampingan KPM PKH?
 - f. Bagaimana menurut anda sikap dan pelayanan pejabat desa dan pmdamping PKH terhadap pelaksanaan program PKH?
 - g. Bagaimana menurut anda jika terdapat KPM PKH yang tidak sesuai kriteria atau komponen di dalamnya sudah tidak ada?

B. DOKUMENTASI

1. Profil desa Rajabasa Lama
2. Profil Program Keluarga Harapan (PKH) desa Rajabasa lama

Metro, Juli 2023
Peneliti,



NUR AINI
1903030015

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Era Yudistira, M,Ak
NIP. 19901003 201503 2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0774/In.28/J/TL.01/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA RAJABASA
LAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **NUR AINI**
NPM : 1903030015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN
LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan prasurvey di DESA RAJABASA LAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Maret 2023
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA RAJABASA LAMA

Alamat : Jl. Raya Lintas Timur Rajabasa Lama 34196

Hal : Balasan

Kepada Yth.

.....
di-

Metro

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ZUNAI DI**

Jabatan : Kepala Desa Rajabasa Lama

Alamat : Dusun Subing Jaya Rt.002/Rw.001

Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu

Kabupaten Lampung Timur

Menerangkan bahwa:

Nama : **NUR AINI**

NPM : 1903030015

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bahwa nama mahasiswa tersebut diatas telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di
Desa Rajabasa Lama sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Rajabasa Lama

Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Kepala Desa Rajabasa Lama





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2596/ln.28/D.1/TL.00/07/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS SOSIAL LAMPUNG
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2597/ln.28/D.1/TL.01/07/2023, tanggal 31 Juli 2023 atas nama saudara:

Nama : **NUR AINI**
NPM : 1903030015
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS SOSIAL LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS SOSIAL LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Juli 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2597/In.28/D.1/TL.01/07/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

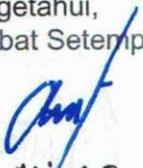
Nama : **NUR AINI**
NPM : 1903030015
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS SOSIAL LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


M. ALI SE
NIP. 19760101 200701 1013

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemkab. Lampung Timur JL. Buay Subing No. 07 Sukadana Ilir
Kode Pos 34194 (0725) 766 046

Nomor : 460/ 2382 /06-SK/2023
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Permohonan Izin Penelitian

Sukadana, 29 Agustus 2023
Kepada Yth
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
IAIN Metro
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan IAIN Metro Nomor: B-2597/In.28/D.1/TL.01/07/2023 Tentang Permohonan Izin Research/ Survei Atas Nama :

Nama : **NUR AINI**
NPM : 1903030015
Judul : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa dimaksud untuk mengadakan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

AGUS SUBAGIYO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19670817 199003 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1238/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

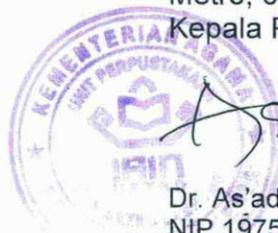
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903030015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 November 2023

Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2023
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA : NUR AINI
NPM : 1903030015**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS
Semester/TA : VIII/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat 07-07-2023	<ul style="list-style-type: none">- pastikan data profil diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi- pertanyaan pd APD seharusnya dibuat lebih mendalam dan tidak langsung mengarah pd akuntabilitas- peneliti harus memahami poin / indikator yg ada di dlm akuntabilitas shg pertanyaan lebih kepada bentuk akuntabilitas yg dimaksud seperti apa.- dari data tersebut, nantinya peneliti lah yg akan menentukan apakah akuntabilitas dlm pengelolaan PKH sudah dipenuhi.	   

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa

Nur Aini
NPM. 1903030015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Belasa 11-07-2023	<ul style="list-style-type: none">- Cek kembali sistematisa outline sudah atau belum dg pedoman yg ada.- perbaiki redaksi pd bab 4 (par B & c) sesuai dg arahan.- pastikan teori terkait dg indikator pd bab 2 yg akan dijadikan sbg dasar dlm menganalisa. (indikator kinerja atau indikator akuntabilitas). <p>ACC outline penelitian.</p>	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef 12/23 /7</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa

Nur Aini
NPM. 1903030015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.ialn@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS
Semester/TA : VIII/2023

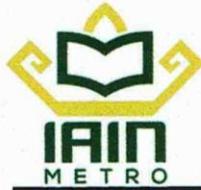
No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 14-07-2023	<ul style="list-style-type: none">- sesuaikan informan pd APD dg sumber data primer yg ada pd bab 3.- indikator akuntabilitas pd bab 2 harus menjadi patokan peneliti dlm membuat pertanyaan APD.- buat pertanyaan yg lebih terstruktur dan sistematis.	ef ef ef
		Acc APD Penelitian	ef 14/23 7

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa

Nur Aini
NPM. 1903030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI /AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	JUM'AT 05-MUU-2023	<ul style="list-style-type: none">- sajikan data dari hasil pra survey pd LBM, kemudian analisa dan kaitkan dg judul penelitian.- lengkapi footnote pd LBM dan subbag yg lain.- sesuaikan tujuan penelitian dg pertanyaan penelitian.- munculkan fenomena yg terjadi sbg alasan dilakukannya penelitian ini.- tambahkan hasil pra survey (wawancara) dg penerima PKH	 ef ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nur Aini
NPM. 1903030015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI /AKS
Semester/TA : VIII/2023

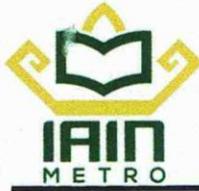
No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS 11-Mei-2023	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki tabel yg ada pd LBM sesuai dg arahan. Data penerima PKH tidak perlu di sajikan semua, sebaliknya data diolah agar informasi yg disampaikan tertuju dg baik maksud dan tujuannya.- pd landasan teori, sajikan subbag-nya secara sistematis.- tidak perlu memunculkan kondisi penerima PKH di lokasi pd landasan teori. Harusnya disajikan di bab 4 saja.	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nur Aini
NPM. 1903030015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI /AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13-April-2023	<ul style="list-style-type: none">- segeerti apa konsep pemikiran dari peneliti melihat permasalahan dan judul yg diangkat dlm skripsi.- sesuaikan penyusunan proposal dg format yg telah ditentukan pd pedoman IAIN Metro.- sajikan LBM secara sistematis dan terstruktur. Pembahasan yg bersifat umum kemudian dilanjutkan dg fenomena yg terjadi di lapangan.- pd LBM harus mencakup ttg hal² yg berkaitan dg judul penelitian, akuntabilitas & kinerja.	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nur Aini
NPM. 1903030015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI /AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 19-Mei-2023	<ul style="list-style-type: none">- bagian judul pd tiap BAB perlu diperbaiki.- pengertian metopen pd tab 3 sebaiknya dihilangkan saja.- istilah asing seharusnya di ketik miring, cek kembali dan perbaiki.- pd sumber data primer munculkan sumbernya saja tanpa menyebutkan nama. Nama dan bagian secara lengkap disajikan sbg informan pd bagian wawancara.- pd teknik analisa data, gambarkan metode yg digunakan dlm penelitian, jangan hanya teorinya saja.	ef ef ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nur Aini
NPM. 1903030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI /AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26-Mei-2023	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki daftar pustaka dan sesuaikan dg pedoman yg ada- lengkapi lampiran lain yg di butuhkan <p>Acc Bab 1,23 (proposal)</p> <p>lanjutkan proses agar dpt diseminarkan.</p>	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nur Aini
NPM. 1903030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI/ AKS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10-oktober 2023		<ul style="list-style-type: none">- pastikan hasil wawancara sudah terlampir pd pembahasan dan dilengkapi footnotenya.- perbaiki struktur organisasi sesuai dg arahan.- lengkapi deskripsi mengenai profil ^{desa} perusahaan- uraikan indikator yg digunakan pd pembahasan, khususnya bagian analisa.	 ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M, Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ybs,

NUR AINI
NPM. 1903030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI/ AKS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 20-Oktober 2023		<ul style="list-style-type: none">- pahami kembali secara mendalam mengenai indikator akuntabilitas.- tambahkan hasil akhir dari pembahasan.- tambahkan teori/hasil wawancara sebagai penguat dari pernyataan analisa peneliti.- kumpulkan sesuai dg pertanyaan penelitian.	   

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ybs,


NUR AINI
NPM. 1903030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR AINI
NPM : 1903030015

Fakultas/Jurusan : FEBI/ AKS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Kamis, 07-23 "	ACC bab 4 & 5 layutkan proses dan lengkap lampiran lainnya agar dpt diujikan.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ybs,

NUR AINI
• NPM. 1903030015

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Suparmi



Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni



Wawancara dengan ibu ares



Wawancara dengan ibu Aten



Wawancara dengan bapak Agus



Wawancara dengan ibu Suci



Wawancara dengan ibu Rias



Wawancara dengan mbah Wiji



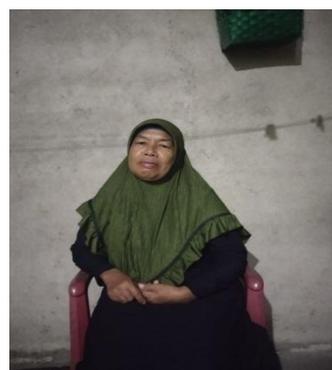
Wawancara bapak Junaidi selaku kepala
Desa



Wawancara ibu Jumaroh selaku
pendamping



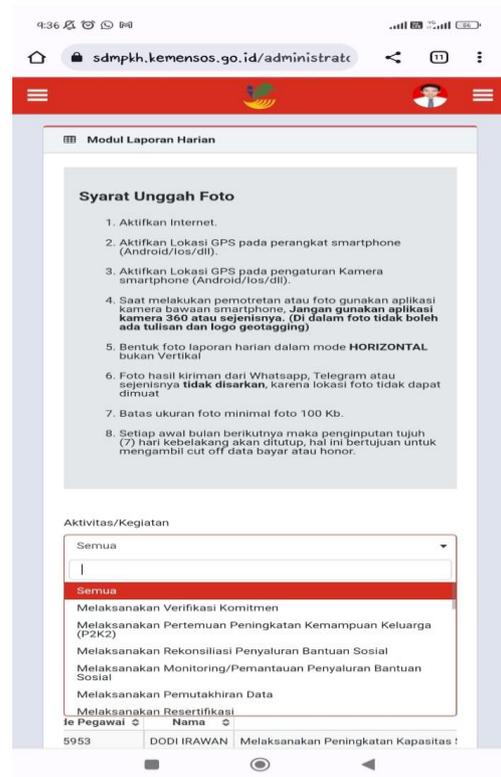
Penerimaan Laporan Pengaduan terkait
saldo 0 karena teridentifikasi gaji UMP



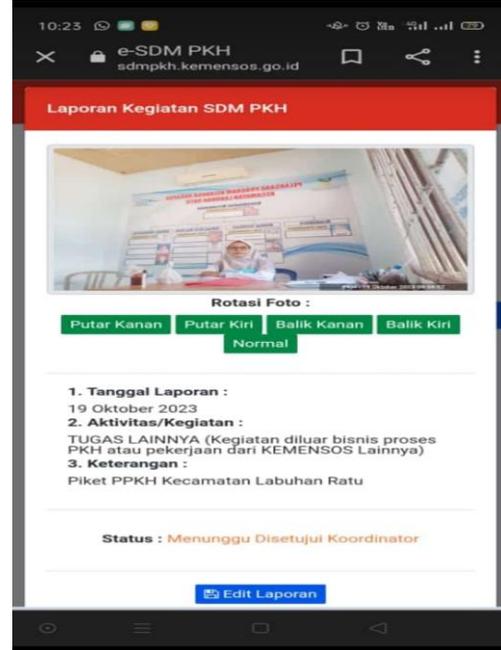
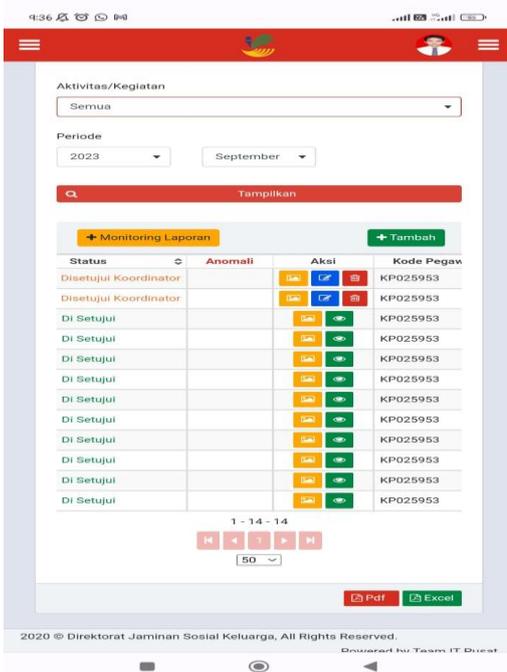
Wawancara dengan ibu Jumisri



Yang mengakibatkan saldo 0



Laporan harian menggunakan aplikasi



Laporan harian



PENGUMUMAN

Assalamualaikum Wr. Wb,

 Terkait peraturan BANSOS Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2023,

- 📍 **BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran)**
- 📍 **PKH (Program Keluarga Harapan)**
- 📍 **BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai)**
- 📍 **DII.**

Akan di **nonaktifkan** secara otomatis oleh sistem, apabila :

Dalam kartu keluarga pengurus (KPM) terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki gaji UMR/UMK/UMP dan atau terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan.

Maka jika dalam Kartu Keluarga terdapat salah satu saja anggota keluarga seperti yang disebut diatas, BANSOS Kemensos tidak akan cair secara otomatis.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dimengerti dengan seksama.




Pemberitahuan peraturan baru dari Buku pedoman untuk KPM PKH kementerian sosial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR AINI lahir pada tanggal 20 September 2000 di desa Bojong kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur. NUR AINI nama yang diberikan memiliki arti Cahaya Mata dan biasa dipanggil dengan ainii atau Ainun, yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, anak dari Bapak Slamet dan ibu Harini. Berikut riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh

1. SD N 7 Rajabasalama, lulus tahun 2013
2. MTS EL-QODAR lulus pada tahun 2016
3. SMA N 1 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2019

Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang berada di IAIN Metro Lampung dengan Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.